
**PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERBASIS MULTIKULTURAL
DALAM MENUMBUHKAN SEMANGAT KEBHINNEKAAN**

Kaspullah¹ Suriadi² Adnan³

kaspullahbangde@gmail.com¹ suriadisambas@gmail.com² ngahadnan@gmail.com³

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas^{1,2,3}

ABSTRACT

This article discusses Multicultural Based Islamic Religious Education. This research was conducted at 5 Sambas State Middle School. West Kalimantan Province. This study discusses the implementation of multicultural-based Islamic religious education in 5 Sambas State Middle School. Qualitative case study. Data sources for teachers, principals, and students. The research instrument uses interviews, observation, and documentation. The results of the analysis of this study conclude that multicultural-based Islamic religious education is realized through: 1) The policy of accepting new learners does not discriminate between ethnicities, races, and religions; 2) The implementation of learning upholds the values of mutual support, openness, gratitude, conflict resolution and violence; 3) Realizing daily life in the life of all people in everyday life in the school environment.

Keywords: *Education, Islamic Religion, Multiculturalism*

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural. Penelitian ini dilakukan Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Sambas. Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini difokuskan pada implementasi pendidikan agama Islam berbasis multicultural di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Sambas. Adapun pendekatan kualitatif menggunakan rancangan studi kasus. Sumber data guru, kepala sekolah, dan siswa. Instrument penelitian menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil analisis dari kajian ini menyimpulkan bahwa pendidikan agama Islam berbasis multikultural diwujudkan melalui: 1) Kebijakan penerimaan peserta didik baru tidak membedakan suku, ras, dan agama; 2) Pelaksanaan pembelajaran menjunjung tinggi nilai saling menghargai, terbuka, kasih sayang, resolusi konflik dan kekerasan; 3) Mewujudkan toleransi kehidupan beragama dalam kehidupan antar semua civitas dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah.

Kata Kunci: *Pendidikan, Agama Islam, Multikultural*

PENDAHULUAN

“Upacara Kebhinnekaan” atau kegiatan lainnya yang bernuansa kebhinnekaan pada setiap daerah di seluruh Indonesia akhir-akhir ini menjadi *trending topic* yang diberitakan pada media massa cetak maupun elektronik. Hal ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat guna mewujudkan persatuan dan kesatuan NKRI yang lebih kokoh. Alasan mendasar dilakukannya mengingat Indonesia merupakan satu diantara negara yang kaya dengan kebhinnekaannya (multikultural); budaya, suku bangsa, ras, maupun agama. Masyarakat multicultural tersebut idealnya merupakan modal dasar yang dapat memberikan dinamika dan kekayaan khazanah peradaban sebuah bangsa.

Abdurrahman Mas‘ud 2004, menyebutkan paling tidak ada tiga indikator pendidikan yang eksklusif, dogmatik dan kurang menyentuh aspek moralitas di antaranya; 1) guru lebih sering menasehati peserta didik dengan cara mengancam; 2) guru hanya mengejar standar nilai akademik sehingga kurang mementingkan budi pekerti dan moralitas anak; serta 3) kecerdasan intelektual peserta didik tidak diimbangi dengan kepekaan sosial dan ketajaman spiritualitas beragama. Hal tersebutlah yang dianggap sebagai kegagalan pendidikan Islam di Indonesia karena belum dapat menampilkan wajah pendidikan yang dapat dijadikan sebagai solusi atas segala permasalahan pendidikan yang pada dasarnya telah di gariskan oleh sumber pendidikan Islam itu sendiri yaitu Al Qur‘an dan Hadits.

Namun, disisi lain apabila tidak dapat memanfaatkan atau mengelola keberagaman berdampak pada ketidakharmonisan dalam tatanan kehidupan, seperti terjadi gesekan-gesekan antar budaya, antar ras, etnik, bahkan agama. Bukan menjadi rahasia umum banyak konflik yang terjadi di negara/daerah/kota di Indonesia dimulai dari konflik sederhana seperti tawuran antar pelajar, tawuran antar warga, atau bahkan konflik antar etnis. Begitu pula, masih belum hilang pada memori kita tragisnya konflik yang disinyalir dengan perbedaan latar belakang kultur atau perbedaan dalam keyakinan beragama. Beragam bentuk konflik terjadi karena disebabkan kurangnya pemahaman di dalam mengelola masyarakat yang multikultural tersebut. Diantara konflik fisik terbuka daerah adalah kekerasan terhadap etnis Tionghoa di Jakarta pada bulan Mei

1998, kemudian konflik etnis di Kalimantan, konflik di Maluku, dan konflik Poso (Muhammad Sofyan 1999).

Karena itu, sangat urgen untuk mem-berikan solusi dan alternatif-alternatif guna melestarikan serta membangun masyarakat yang berbhinneka melalui jalur pendidikan formal. Bagaimanapun, pendidikan tetap di yakini sebagai instrumen yang ampuh untuk penyadaran (*conscious*) kepada masyarakat supaya tidak timbul konflik etnis, budaya, dan agama. (Choirul Mahfud, 2010: 148). Melalui pendidikan diharapkan mampu memberikan tawaran-tawaran yang mencerdaskan masyarakat akan pentingnya dari keragaman. Sedangkan pendidikan yang dimaksudkan untuk pengembangan masyarakat yang berbhinneka (multikultural) tidak hanya terkait etnik semata termasuk sikap toleran, namun mengarah kepada persoalan yang lebih substantif diantaranya persoalan-persoalan ketidakadilan, kemiskinan, penindasan, dan keterbelakangan kelompok-kelompok minoritas dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan lainnya. (Ayumardi Azra, 2007: ix). Dengan demikian, berarti sekolah memegang peranan penting dalam menginternalisasikan nilai kebhinnekaan (multikultural) pada anak didik sejak dini, yaitu nilai-nilai kebersamaan, toleran, cinta damai, dan menghargai perbedaan. Selanjutnya nilai-nilai tersebut akan tercermin pada tingkah-laku mereka sehari-hari.

Pendidikan agama Islam yang dimasukkan dalam kurikulum pendidikan umum mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, merupakan bagian dari pendidikan Islam yang sarat dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Pendidikan Islam mempunyai misi esensial untuk membangun karakter muslim yang memahami ajaran agamanya serta mempunyai kesadaran imani yang diwujudkan ke dalam sikap dan perilaku sehari-hari sebagai bentuk pengamalan ajaran agama. Menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas, hasil yang ingin dicapai dari pendidikan Islam adalah menciptakan manusia beradab dalam pengertian yang menyeluruh meliputi kehidupan spiritual dan material Wan (Mohd. Nor Wan Daud, 1998). Begitu juga menurut al-Abrasyi, mencapai suatu akhlak yang sempurna (*fadhilah*) adalah tujuan utama pendidikan Islam. Namun faktanya berbicara lain, pendidikan agama Islam (PAI), secara umum belum mampu berkontribusi positif terhadap peningkatan moralitas dan sikap toleransi khususnya di kalangan peserta didik.

Hal ini sangat terkait dengan proses implementasinya di lapangan. Dalam praksisnya peserta didik selalu diarahkan pada penguasaan teks-teks yang terdapat dalam buku pengajaran, mereka selalu dihadapkan pada pertanyaan dan hapalan kulit luarnya saja (ranah kognitif), sedangkan substansinya berupa penanaman nilai-nilai agama hilang begitu saja seiring dengan bertumpuknya pengetahuan kognitif mata pelajaran yang ada di sekolah

Melalui penelaahan yang padu dan sistematis akan dieksplorasi bagaimana merajut semangat kebhinnekaan, khususnya dalam perspektif pendidikan agama Islam yang dilaksanakan di SMP Negeri 5 Sambas. Hal ini dilakukan mengingat SMP Negeri 5 dan Kabupaten Sambas umumnya secara geografis, demografis, maupun historis merupakan kabupaten yang terletak di bagian paling utara Kalimantan Barat dan berbatasan langsung dengan Serawak (Malaysia Timur). (Nurcholish Madjid, 2000: xxvi). Secara geografis seperti itu memungkinkan terjadinya persinggungan langsung dengan masyarakat global yang *notabene*nya terdapat perbedaan latar belakang kultur dan budayanya. Sedangkan secara demografis Sambas merupakan daerah yang memiliki masyarakat sangat multikultur. Suku Melayu; 356.442, Cina; 49.063, Kendayan; 12.491, Darat; 1.467, Pesaguan; 109, Jawa; 12.677; Melayu Pontianak; 911, Lain-lain; 20.870. (Badan Pusat Statistik, *Kalimantan Barat dalam Angka* (Pontianak: *Badan Pusat Statistik Propinsi Kalimantan Barat*, 2005), hlm. 28.) Selain itu, ditinjau dari aspek historis Sambas merupakan salah satu daerah yang pernah terjadi konflik horizontal.

Harapan semua itu tujuan akhirnya agar siswa memiliki kepekaan untuk saling memahami, menghormati, atau menghargai dalam menghadapi gejala-gejala dan masalah-masalah sosial yang berakar pada perbedaan suku, ras, maupun agama. (M. Ainul Yakin, 26). Kemudian diharapkan mereka mampu menerapkan nilai tersebut pada lingkungan SMP Negeri 5, bahkan dapat diimplementasikan pada lingkungan tempat siswa berdomisili.

Kata “bhinneka” lazimnya dapat ditemukan dalam semboyan Negara Republik Indoensia, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Merujuk pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 prasa Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno , (Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 Tentang Lambang Negara dan Penjelasanannya) yang secara harfiah diartikan dengan berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Apabila diterjemahkan perkata, maka bhinneka diartikan dengan: berbeda-beda, beraneka ragam, plural atau multikultural. Dengan demikian dapat dipahami makna bhinneka (baca bhinneka tunggal ika) berarti tentang konsep pluralistik maupun multikulturalistik. (Pitoyo, 2012: 67). Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan wujud persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan.

(https://id.wikipedia.org/wiki/Bhinneka_Tunggal_Ika. Diakses tanggal 09 Desember 2016. Makna kebhinnekaan seperti itulah yang diikrarkan para pemuda dari seluruh Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 dan diterima sebagai realitas atau keniscayaan (*sunnatullah*).

Pendapat para ahli seperti Irwan Abdullah, mendefinisikan kebhinnekaana atau multikultural (*isme*) sebagai sebuah paham yang menekankan pada kesederajatan dan kesetaraan budaya-budaya lokal dengan tanpa mengabaikan hak-hak dan eksistensi budaya yang ada. Dengan kata lain, penekanan utama multikultural adalah kesetaraan budaya. Choirul Mahfud mengemukakan sebagai sebuah konsep dimana sebuah komunitas dalam konteks kebangsaan dapat mengakui keberagaman, perbedaan, dan kemajemukan budaya, baik ras, suku, etnis, agama dan lain sebagainya. Tidak jauh berbeda dengan pendapat sebelumnya, Bikhu Parekh menjelaskan tidak sekedar mengenai perbedaan dan identitas, ia adalah suatu kumpulan tentang keyakinan dan praktik-praktik yang dijalankan oleh sekelompok masyarakat untuk memahami dirinya sendiri dan dunianya, serta mengatur kehidupan individual dan kolektif mereka.

Konsep multikulturalisme mengulas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi, politik, demokrasi, keadilan, penegakan hukum, kesempatan kerja dan usaha, hak asasi manusia, hak budaya komunitas dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, tingkat dan mutu produktivitas serta berbagai konsep lainnya yang lebih

relevan. Konsep ini senada dengan apa yang dikemukakan Bloom dalam Atmadja, bahwa multikulturalisme meliputi sebuah pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang dan sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain (Suyanto, 2013).

Nampaknya, dari beberapa definisi tentang kebhinnekaan (multikultur) yang dikemukakan tersebut pada prinsipnya tidak menunjukkan adanya perbedaan, akan tetapi memiliki substansi sama yakni menyangkut pengakuan adanya keberagaman dalam budaya baik yang menyangkut ras, suku, etnis, bahasa, agama, dan lainnya. Kemudian dari keberagaman dan perbedaan tersebut diyakini sebagai sesuatu hal yang alamiah (*natural/sunnatullah*) dan tidak terbantahkan eksistensinya. Menurut konsep ajaran Islam, kebhinnekaan atau keberagaman secara eksplisit ditunjukkan dalam Al-Qur'an diantaranya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. Hujarat, [49]: 33).

Melalui ayat ini Allah Swt menyatakan bahwa manusia diciptakan terdiri atas jenis laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar mereka dapat saling kenal dan mengenal atau saling *taffahum*, *ta'awun*, dan *tabayyun* sesama mereka. Manusia yang secara fitrah adalah makhluk sosial, maka hidup bermasyarakat menurut suatu keniscayaan adanya. Melalui kehidupan yang bersifat kolektif sebagai sebuah masyarakat, tentu di dalamnya terdapat banyak keragaman atau perbedaan dalam berbagai hal. (M. Quraish Shihab, 1998: 320).

Berdasarkan keterangan ayat Al-Quran maupun pendapat mufassir diungkapkan bahwa keberagaman atau multikultural adalah sebagai suatu yang mutlak adanya, yaitu dengan memandang positif-optimis terhadap kemajemukan itu sendiri dan menerima

nya sebagai kenyataan. Adanya perbedaan antara manusia dalam bahasa dan warna kulit harus diterima sebagai kenyataan yang positif untuk saling mengenal, dan perbedaan tersebut merupakan salah satu kebesaran Allah. Juga terdapat penegasan tentang kemajemukan dalam pandangan dan cara hidup antara manusia yang tidak perlu digusurkan, dan hendaknya dipakai sebagai pangkal tolak berlomba-lomba menuju kebaikan. (Nurcholish Madjid, : xx).

Nurcholish Madjid menjelaskan hal ini khususnya dalam konteks agama, bagaimana seharusnya mencari dan menemukan titik kesamaan dari perbedaan tersebut dan seperti itulah bagian dari ajarannya yang amat penting. Seperti yang diterangkan di dalam Al-Qur'an perintah Allah kepada Nabi saw untuk mengajak kaum *ahl kitab* bersatu dalam satu pandangan yang sama (*kalimah sawa'*), yaitu paham Ketuhanan Yang Maha Esa. Pendapat yang dikemukakan tersebut jika dipahami dalam konteks pluralitas atau multikultural yang lebih luas yaitu adanya kemajemukan bukanlah untuk dicari perbedaannya, akan tetapi bagaimana mengelola perbedaan tersebut sehingga menjadi sebuah kenyataan positif untuk saling menghargai dengan selalu berupaya mencari kebaikan.

Kemudian secara filosofis konsep kebhinnekaan tidak terlepas dari pengaruh filsafat post modernisme yang mengakomodir sensitivitas manusia terhadap perbedaan dan memperkuat kemampuan toleransi dengan realitas yang terukur. Selain itu, post-modernisme menolak kebenaran tunggal atau yang bersifat absolut dan menghindari sikap klaim kebenaran (*truth claim*). Kebenaran diyakini bersifat jamak dan hakikat dari semua, termasuk kehidupan manusia itu dalam semua aspeknya adalah berbeda (*all is difference*). (Rizal Muntasyir, dkk 2004: 1990).

Berdasarkan filsafat post modernisme masyarakat multikultural menjadi fakta yang tidak bisa disangkal, karena itu perlu dibangun prinsip kesadaran multikultural, yakni paham yang mengakui adanya keragaman dalam kehidupan sekaligus memperlakukan orang lain secara sama proporsional.

Sedangkan kebhinnekaan dalam konteks pendidikan secara eksplisit dituangkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 4 bahwa prinsip penyelenggara pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural (budaya) dan

kemajemukan bangsa, sesuai dengan nilai-nilai dasar negara yakni Pancasila. Ketika menguraikan dimensi pendidikan multi kultural dalam pendidikan dengan merujuk pada kepada konsep James E. Banks, yaitu:

- a. *Content integration*, mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep dasar, generalisasi dan teori dalam mata pelajaran atau disiplin ilmu. Dalam hal ini mencakup keluasaan bagi guru memberikan contoh, data, dan informasi dari berbagai kebudayaan dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep. Sumber rujukan untuk konsep ini mencakup “apa” dan “di mana ditempatkan dalam kurikulum, serta dipertimbangkan “siapa” yang mengikutinya.
- b. *The Knowledge Construction Process*, membawa peserta didik untuk memahaminya implikasi budaya kedalam sebuah mata pelajaran. Ketika proses konstruksi pengetahuan diimplementasikan di kelas guru membantu siswa agar mengetahui bagaimana pengetahuan itu diciptakan dan bagaimana ia dipengaruhi oleh posisi ras, etnik, dan kelas sosial individu dan kelompok.
- c. *An Equity Paedagogy*, menyesuaikan metode pembelajaran dengan cara belajar peserta didik, hal ini dilakukan dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam mulai dari ras, budaya maupun sosial. Konsep ini mengajarkan bagaimana stratifikasi sosial dapat dikemas dalam model pendidikan untuk semua dengan kesetaraan tanpa diskriminasi atau dominasi.
- d. *Prejudice Reduction*, (Pengurangan Prasangka) mengidentifikasi karakteristik ras dan menentukan metode pembelajaran peserta didik, sebagai upaya membantu siswa mengembangkan sikap dan nilai serta perilaku yang lebih demokratis. Pergaulan antar kelompok secara intensif dapat mereduksi prasangka, karena dengan pergaulan itu terbuka wawasan untuk saling menenal, mengetahui sekaligus mengalami pertautan antar karakteristik, serta pelatihan melakukan pemecahan masalah.
- e. *Empowering School Culture* (pemberdayaan Budaya Sekolah) Melatih peserta didik untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang menggambarkan iklim sekolah yang berorientasi multi-kultur, sehingga dengan budaya sekolah tersebut menjadikan dari latar sosial berbeda mengalami kesetaraan dan penguatan kultur. Selain itu dapat berinteraksi dengan seluruh staff serta peserta didik yang berbeda etnik dan ras dalam upaya menciptakan budaya akademik. Dalam tataran sejarah

peradaban Islam khususnya, Rasulullah Saw mengimple mentasikannya dalam kehidupan bermas yarakat awal perkembangan Islam di kota Madinah. Nabi Muhammad men-cari titik temu dengan berbagai golongan di Madinah dengan terlebih dahulu mengakui hak eksistensi masing-masing kelompok pada masyarakat atau golong-an. Hal ini yang diabadikan dalam dokumen yang disebut “konstitusi Ma-dinah. Begitu juga, Umar bin Khattab meneruskan sunnah nabi itu dalam sikapnya terhadap penduduk Yerusalem, dalam dokumen yang kemudian dikenal dengan piagam Aelia (karena Yerusalem saat itu juga dikenal dengan sebutan Aelia). Kemudian diteruskan para khali-fah Umawi di Andalusia (Spanyol), bahkan politik kemajemukan yang di-bawa umat Islam ke Spanyol itu dilukis kan Max Dimont sebagai rahmat yang mengakhiri kezaliman Kristen. Setelah pemerintahan Islam selama 500 tahun menciptakan sebuah Spanyol untuk tiga agama dan “satu tempat tidur”: orang Islam, Kristen, dan Yahudi hidup rukun dan bersama-sama menyertai peradaban yang gemilang. (Nurcholish Madjid, xxvi).

Kebhinnekaan konteks keindonesiaan, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang mas yarakatnya sangat multikultur, dan inilah salah satu yang menjadi kekhasannya. Kemajemukan bangsa Indonesia itu secara garis besarnya dapat diklasifikasikan men-jadi dua perspektif yaitu horisontal dan vartikal. Kemajemukan perspektif hori-sontal dapat dilihat dari perbedaan agama, etnis, bahasa daerah, geografis, pakaian, ma kanan, dan kebudayaan. Sedangkan pers-pektif vartikal kemajemukan itu dapat dilihat dari perbedaan tingkat pendidikan, ekonomi, pemukiman, pekerjaan, dan ting kat sosial budaya. (Usman Pelly dan Asih Menanti, 1994: 68)

Berangkat dari masyarakat yang multi-kultural maupun multi religius tersebut, dalam perjalan sejarah perjuangan Indone-sia para pendiri bangsa sudah memiliki visi ke depan dengan meletakkan konsep dasar multikulturalisme, yaitu ketika diusungnya momentum Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei 1908. Sebelumnya masya-rakat Indonesia sangat kental dengan sifat kedaerahan maupun kesukuan, hal ini nam pak beberapa organisasi kepemudaan yang ada saat itu seperti Jong Java, Jong Sumatera, Jong Selebes, dan lainnya. Selain itu dalam masyarakat kerap terjadi peng-klasifikasian berdasarkan ras atau kasta-kasta, hal-hal seperti inilah yang mengaki-batkan terjadi

marjinalisasi terhadap kelompok tertentu sebagai inferior, *the second class* maupun *stereotype*.

Posisi keragaman sebagai variabel bebas memang berada pada tataran sekolah dan masyarakat di mana suatu kurikulum dikembangkan dan diharapkan menjadi pengubah yang tangguh sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dapat diperkirakan (*perceived needs of a society*). (Matsuroh, 72). Kemudian kesadaran identitas kesukuan, startifikasi, kasta-kasta tersebut dipertegas kembali untuk disatukan dalam komitmen bersama dalam momentum Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang mengakui persamaan dalam wadah bangsa Indonesia. Akhirnya, hasil sebuah komitmen tersebut menghantarkan bangsa Indonesia menggapai kemerdekaannya 17 Agustus 1945. Untuk perjuangan persamaan dan semangat multikulturalisme juga ditunjukkan ketika pendiri bangsa dalam penyusunan dasar negara dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketika menolak pencantuman tujuh kata pada sila pertama yang dipahami bernuansa eksklusif, akhirnya menjadi kesepakatan bersama dan menunjang eksistensi kebhinnekaan bangsa. (H.A.R. Tilaar, 2009: 205).

Pada tahapan selanjutnya baik pada masa pemerintahan Orde Lama atau masa Orde Baru varian-varian keberagaman atau multikultural sudah mulai dimunculkan terutama dari aspek ranah politik dengan hadirnya multi partai dengan ciri khas masing-masing, mulai dari yang berasaskan nasionalisme (PNI), agama (Masyumi-NU), maupun komunisme (PKI). Walaupun realitanya akhir masa Orde Baru ada kecenderungan pendangkalan makna multikultural dengan upaya penyeragaman dalam bingkai persatuan dan kesatuan bangsa, dengan melalui organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan, maupun organisasi profesi, yaitu melalui strategi dan kebijakan-kebijakan yang sentralistik. Upaya penyeragaman tersebut tak terkecuali didalam pendidikan mulai dari seragam sekolah, kurikulum, metode, hingga buku bahan ajar semua mata pelajaran tanpa memberikan kesempatan untuk tampilnya suatu pola yang beragam. Adanya pola penyeragaman seperti ini yang berakibat pada sikap peserta didik yang tidak siap secara mental untuk berbeda sehingga muncul eksklusivisme, dan tidak toleran. Mereka yang berbeda dianggap sebagai lawan, bukan mitra dialog yang mesti dihormati ataupun untuk dihargai. (Ngainun Naim dan Achmad Sauqi, 2008: 40). Berdasarkan pada dua landasan pokok yakni landasan preskriptif maupun landasan

deskriptif dapat dipahami kebhinnekaan (multikultural) sesungguhnya pengakuan keberagaman dalam budaya baik yang menyangkut ras, suku, etnis, bahasa, aga-ma, dan lainnya. Kemudian dari keberagamaan dan perbedaan tersebut diyakini sebagai sesuatu hal yang alamiah (natural/sunna tullah) yang tidak mungkin dilawan bahkan diingkari sekalipun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan rancangan studi kasus. Sesuai dengan pendekatan dan rancangan penelitian yang digunakan, maka instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah peneliti sendiri. Kehadiran peneliti pada penelitian kualitatif merupakan suatu keharusan. Karena penelitian jenis ini lebih mengutamakan temuan observasi yang dilakukan peneliti pada latar alami penelitian secara langsung. Penelitian dilaksanakan di Propinsi Kalimantan Barat dengan mengambil lokasi pada sekolah menengah Pertama di SMPN 5 Sambas.

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono; 200). Dalam penelitian ini sebagai sumber primer adalah Kepala Sekolah, Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dan peserta didik serta pihak sekolah lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Sedangkan untuk sumber sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen tentang administrasi sekolah. teknik pengumpulan data, maka penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan observasi(pengamatan), interview (wawancara), koesioner (angket) dokumentasi dan gabungan keempatnya (Sugiyono; 2009)

Penelitian ini menggunakan analisis data kasus individu (individual cases). Langkah-langkah analisis data yang dilakukan bersama-sama dengan pengumpulan data dan mengikuti petunjuk Miles & Huberman (1992) yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian data dan (3) kesimpulan (kesimpulan sementara, verifikasi dan kesimpulan akhir). Penelitian kualitatif memiliki karakteristik tersendiri dalam mengecek keabsahan data. Menurut Guba dan Lincoln (1985) bahwa mengecek keabsahan data kualitatif melalui empat pendekatan, yaitu: derajat kepercayaan (credibility), kecocokan (transferability), ketergantungan (dependenitas), dan penegasan (confirmability).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merajut semangat kebhinnekaan mela lui jalur pendidikan formal pada prinsipnya pendidikan yang mengakomodir keberaga-man atau berbasis multikultural (*multicultural Based Education*). Jadi, pendidik-an berbasisi multikultural khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dimaksudkan adalah pendidikan yang meng akui dan merefleksikan pentingnya nilai-nilai keberagaman secara kultur pada setiap realitas dan menjadi sebuah keniscayaan dalam pembelajaran dan mencerminkan cita-cita persamaan dan kesetaraan.

Menurut James E. Banks ada lima hal mendasar konsep dan aplikasi pendidikan berbasis multikultural yakni; *Content integ ration, The Knowledge Construction Process, An Equity Pedagogy, Prejudice Redu cation, dan Empowering School culture* . (Maslikhah, 2007: 75-79). Apabila merujuk pada teori yang dikemukakan James E Ban k, beratri ada lima pilar mendasar untuk merajut kebhinnekaan dalam pendidikan formal khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

Implementasi Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural

Implementasi Pendidikan Agama Islam berbasis Multikultural Pada Pelaksanaan Pembelajaran Berdsarkan hasil wawancara dengan guru pendidikan agama Islam di SMPN 5 Sambas di hasilkan kesimpulan bahwa guru PAI di sekolah tersebut telah mengimplementasikan pem belajaran yang berwawasan multikultural. Hal tersebut dapat di lihat dari sikap yang ditunjukkan oleh guru ketika sedang melakukan pembelajaran PAI, maka siswa yang beragama non Islam diberi pilihan untuk mengikuti pelajaran tersebut atau meninggalkannya. Sikap tersebut didasarkan kepada pemahaman agama, bahwa dalam Islam tidak ada pemaksaan dalam beragama, sehingga kebijakan untuk memprsilahkan siswa non pendidikan agama Islam merupakan bagian dari sikap toleransi dalam beragama, dan ini merupakan bagian dari pendidikan agama Islam yang berbasis multicultural.

Dalam proses Kegiatan Belajar Pendidikan Agama Islam di SMPN 5 Sambas menurut pengamatan peneliti telah mengimplementasikan pendidikan yang berwawasan multikultural, hal tersebut terbukti pembelajaran PAI peserta didik yang beragama non Islam tidak diikutkan secara langsung untuk mengikutinya, mereka hanya dikasih kesempatan untuk memilih mengikuti atau belajar diperpustakaan,

hal tersebut dikarenakan untuk tidak memaksakan pendidikan agama yang tidak sama dengan agama yang dianut mereka. Walaupun demikian, menurut bpk kamil bahwa walaupun mereka tidak memperoleh pendidikan agama di sekolah tetapi dalam komunitas mereka ada perkumpulan yang dilakukan setiap hari Kamis diluar jam pembelajaran untuk mempelajari agama yang dianutnya. Menurut hemat peneliti inilah bentuk toleransi yang dilakukan guru PAI di SMPN 5 Sambas sebagai perwujudan dari pendidikan yang berwawasan multikultural.

Karena bagi bpk Syamsul bahwa urusan agama dan akidah adalah hal yang tidak bisa dipaksakan, walau terkadang ketika proses pembelajaran PAI ada siswa yang beragama non Islam mengikutinya, tapi itu tidak dipaksakan. Untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar Pendidikan Agama Islam di SMPN 5 Sambas menurut penulis berdasarkan wawancara dengan guru PAI yakni bpk. Fauzi peneliti menemukan bahwa pelaksanaan pendidikan agama Islam SMPN 5 Sambas berjalan sesuai dengan semestinya, bahwa semua peserta didik berhak memperoleh pendidikan agamanya, hanya untuk peserta didik yang beragama non Islam ketika proses pembelajaran PAI guru menawarkan untuk mengikuti atau tidak mengikutinya, akan tetapi kebanyakan dari siswa non Islam tetap mengikutinya, hal tersebut bukan berarti mereka dipaksa untuk mengikutinya, tapi dalam satu sisi di sekolah tersebut belum tersedia guru yang beragama selain non Islam. Tapi sesuai dengan hak yang harus diperoleh peserta didik untuk memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agamanya, pihak sekolah mempersilahkan peserta didik untuk belajar agamanya diluar jam pembelajaran, dan hal ini dimanfaatkan siswa untuk melakukannya, sehingga setiap hari Kamis siswa yang beragama non Islam belajar agamanya diluar jam belajar.

Berdasarkan hasil yang prosentase yang diperoleh pada implementasi Kegiatan Belajar Mengajar siswa pada Pendidikan Agama Islam berwawasan multikultural di SMPN 5 Sambas dapat penulis simpulkan bahwa: 1) Dalam pemberian materi pelajaran PAI, meniadakan praktek diskriminatif pada peserta didik, menjunjung tinggi nilai saling menghargai dan toleransi dalam perbedaan, menunjukkan sikap apresiasi dan independensi, serta konsistensi dalam beragama telah terimplementasikan dengan baik; 2) Sedangkan untuk sikap toleransi dalam

hal sosial telah diimplementasikan namun belum maksimal; 3) Adapun untuk pendalaman materi toleransi pada pelajaran PAI maupun pada pelajaran yang lain masih kurang sehingga dikategorikan belum terimplementasi secara maksimal. Berdasarkan hasil prosentase yang diperoleh pada implementasi Kegiatan Belajar Mengajar pada Pendidikan Agama Islam berwawasan multikultural di SMPN 5 Sambas dapat penulis simpulkan bahwa: 1) Dalam penyampaian materi toleransi pendidikan agama Islam, serta menunjukkan rasa saling menghormati serta hidup berdampingan dalam suasana perbedaan dikategorikan sudah diimplementasikan; 2) Sedang untuk pendalaman materi toleransi beragama, praktek toleransi dalam kehidupan sosial sudah dilaksanakan tapi belum maksimal; 3) Adapun dalam pelaksanaan toleransi dalam kehidupan sehari-hari masih dikategorikan kurang.

Berdasarkan hasil prosentase yang diperoleh pada implementasi Kegiatan Belajar Mengajar siswa pada Pendidikan Agama Islam berbasis multikultural di SMPN 5 Sambas dapat penulis simpulkan bahwa: 1) Dalam pelaksanaan pemberian materi Pendidikan Agama Islam menunjukkan sikap toleransi dalam perbedaan, menunjukkan sikap apresiasi dan independensi serta, meniadakan perlakuan diskriminasi, membangun dan memelihara rasa saling pengertian sudah diimplementasikan secara baik; 2) Sedangkan untuk mempraktekan sikap toleransi beragama baru dikategorikan cukup dalam implementasinya sehingga belum maksimal; 3) Pendalaman materi toleransi kehidupan agama serta sosial dikategorikan masih kurang.

Dari hasil kesimpulan yang diperoleh, maka beberapa hal yang perlu dipertahankan dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar siswa di SMPN 5 Sambas adalah sikap saling menghargai dengan perbedaan yang ada. Sedangkan untuk pemahaman siswa tentang arti toleransi dalam perbedaan perlu ditingkatkan lagi sehingga jika memiliki pengetahuan yang maksimal tentang arti toleransi yang sebenarnya maka dapat diharapkan akan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian implementasi pendidikan agama Islam berwawasan multikultural yang di gagas menurut Ngainun Naim sebagai solusi pendidikan yang islami dapat dilaksanakan dalam lembaga pendidikan menjadi hal yang dibutuhkan adanya. Karena menurut penulis memang untuk membuat terobosan pendidikan yang memuat nilai-nilai multikultural harus menjadi visi dan misi

pendidikan agama Islam pada masa kini dan masa yang akan datang, sehingga tidak bisa ditawar-tawar lagi dalam implementasinya.

Penggunaan multi metode dan multi model pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada dasarnya merupakan miniatur kehidupan siswa kelak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Ketika pembelajaran berlangsung di dalam kelas maupun di luar kelas dapat melatih siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang menggambarkan iklim sekolah yang berorientasi multikultur, sehingga melalui budaya dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam menjadi budaya sekolah. Upaya pembudayaan nilai-nilai keberagaman melalui Pendidikan Agama Islam dilakukan dengan peneladanan dari guru maupun pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Diyakini bahwa untuk meningkatkan semangat kebersamaan tidak hanya dilakukan melalui pembelajaran semata, akan tetapi akan lebih efektif dilakukan dengan peneladanan dari guru atau pegawai di sekolah maupun pembiasaan di sekolah. Budaya dalam pembelajaran atau dalam sekolah yang dikembangkan antara lain budaya menghargai orang lain; guru dan pegawai, maupun antar sesama siswa, sopan santun dalam bertutur kata, maupun sopan dalam bertindak. Sedangkan pembiasaan yang dikembangkan untuk merajut semangat kebersamaan adalah melalui gotong-royong dalam menjaga kebersihan di kelas maupun di lingkungan sekolah. Dengan mematuhi aturan-aturan yang disepakati bersama didalam kelas merupakan implementasi yang nyata terhadap keberhasilan menjaga rasa kebersamaan dalam keberagaman. Melalui budaya yang dikembangkan seperti itu menjadikan dari latar sosial berbeda mengalami kesetaraan dan penguatan kultur. Kegiatan-kegiatan yang termasuk program pengembangan diri dan menjadi kekhasan sekolah khususnya SMP Negeri 5 Sambas saat ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan paparan dan analisis data terkait dengan menumbuhkan kebhinekaan pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 5 Sambas, dirumuskan beberapa simpulan: Implementasi pendidikan agama Islam berbasis multikultural di SMP Fatahillah, SMPN 5 Sambas diwujudkan melalui (1) Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Bahwa dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik

baru dapat dilaksanakan dengan tanpa membeda-bedakan latarbelakang siswa dari suku, ras, dan agamanya. Wujud dari nilai-nilai multikultural di sini adalah merangkul dan menghargai segala bentuk keragaman suku, ras, dan agama. Selain itu juga memberikan kesempatan kepada semua anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan; (2) Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar materi Pendidikan Agama Islam berbasis multikultural dapat diwujudkan dalam pendalaman materi tentang toleransi kehidupan beragama dan kehidupan sosial, serta mempraktkannya dalam bentuk menjunjung tinggi nilai saling menghargai, menunjukkan sikap menghargai, terbuka dalam sikap kasih sayang, serta resolusi konflik dan rekonsiliasi nir kekerasan oleh para pendidik dalam Kegiatan Belajar Mengajar; (3) Implementasi nilai-nilai multikultural peserta didik sebagai hasil dari implementasi pendidikan agama Islam dapat diwujudkan dalam bentuk toleransi kehidupan beragama dalam kehidupan antar semua civitas dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Praktek penyelenggaraan pendidikan Islam berwawasan multikultural masih perlu dikembangkan lagi terutama pada materi tentang toleransi kehidupan beragama dan kehidupan sosial pada mata pelajaran yang lain. Sehingga cita-cita Undang-Undang RI untuk menyelenggarakan pendidikan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azazi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan nilai kemajemukan bangsa bisa terwujud.

Untuk merajut semangat kebhinnekaan dilakukan melalui jalur pendidikan formal yakni pendidikan yang berbasis multikultural (*Multicultural Based Education*). Pendidikan berbasis multikultural khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dimaksudkan adalah pendidikan yang mengakui dan merefleksikan pentingnya nilai-nilai keberagaman secara kultur pada setiap realitas dan menjadi sebuah keniscayaan dalam pembelajaran dan mencerminkan cita-cita persamaan dan kesetaraan. Ada lima hal mendasar konsep dan sekaligus implementasi pendidikan berbasis multikultural yakni melalui; *Content integration, The Knowledge Construction Process, An Equity Pedagogy, Prejudice Reduction, dan Empowering School Culture.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Mas'ud. 2004. Format Baru Pola Pendidikan Keagamaan para Masyarakat Multikultural dalam Perspektif Sisdiknas, dalam Mu'tamar Ramadhan dan Hesti Herdinah (eds) Antologi Studi Agama dan Pendidikan. Semarang: Aneka Ilmu Hidayatulloh, Syarif., Pembelajaran Agama Islam Berbasis Wawasan Multikulturalisme. Jurnal Penamas, Vol XXIII No.3 Th.2010.
- Ali Maksum dan Luluk Yunan Rohendi. 2004. *Paradigma Pendidikan Universal* Yogyakarta: IRCiSoD.
- Azra, Azyumardi 2007. Pendidikan Agama Membangun Multikulturalisme Indonesia, dalam pengantar buku Zakiyudin Baidhawiy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural* Jakarta: Erlangga.
- Badan Pusat Statistik. 2005. *Kalimantan Barat dalam Angka* (Pontianak: Badan Pusat Statistik Propinsi Kalimantan Barat).
- Bellah, Robert N. 1976. *Beyond Belief*, New York Harper & Row.
- Bogdan, R. C & Biklen, K.S. 1998. *Qualitative Research For Education; an Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon.
- Dodi, Limas, *Relevansi Pemikiran Multikultural Abdurrahman Wahid*, Jurnal Empirisma, Vol 20 N0 2, juli 2011.
- H.A.R. Tilaar. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Bhinneka_Tunggal_Ika. Diakses tanggal 09 Desember 2018.
- Madjid, Nurcholish. 2000. *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina.
- Mahfud, Choirul. 2010. *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Masdar Hilmy. 2003. *Menggagas Paradigma Pendidikan Berbasis Multikulturalisme*, Ulumuna, VII, 12 (Juli-Desember, 2003), 332-342.
- Maslikhah. 2007. *Quo Vadis Pendidikan Multikultural*, Salatiga: STAIN Salatiga Press.
- Muhammad Sofyan. 1999. *Agama dan Kekerasan dalam Bingkai Reformasi* Yogyakarta: Media Pressindo.
- Ngainun Naim dan Achmad Sauqi. 2008. *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Parekh, Bikhu .2008. *Rethinking Multiculturalism: Keberagaman Budaya dan Teori Politik*, Yogyakarta: Kanisius.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang lambang negara dan penjelasannya.

Pitoyo, dkk. 2012. *Pancasila Dasar Negara*, Yogyakarta: PSP Press.

Rizal Muntasyir, dkk. 2004. *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Shihab, M. Quraish. 1998. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelpagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan.

Silabus Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Untuk SMP (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016)

Sj, Gudon. 1997. *Ketidak Adilan Gender dalam Diskursus Kekuasaan*, Wacana no. 7.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.Bandung: Alfabeta.

Suyanto, *Multikulturalisme Dalam Sistem Pendidikan Agama Islam: Problematika Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, Jurnal ADDIN, Vol. 7, No. 1, Februari 2013
Matsuroh, *Kurikulum Pendidikan Berbasis Multikultural*, Jurnal Millah Edisi Khusus Desember 2010,.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2005. Bandung: Fokusmedia.

Usman Pelly dan Asih Menanti. 1994. *Teori-teori Sosial Budaya*, Jakarta: Dirjen Depdikbud.

Wan Mohd. Nor Wan Daud. 1998. *Filsafat dan Prektek Pendidikan Islam Syed Muhammad Naquib al-Attas*, Bandung: Mizan.